

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan data terkait gambaran umum wilayah Kota Semarang, Profil Polrestabes Kota Semarang, dan Program E-Tilang. Penjelasan pada bab ini juga menjadi landasan untuk menganalisis efektivitas program pada bab-bab selanjutnya.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Semarang mencakup area seluas 373,70 km² atau sekitar 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

sebelah barat : Kabupaten Kendal
sebelah timur : Kabupaten Demak
sebelah selatan : Kabupaten Semarang
sebelah utara : Laut Jawa

Secara administratif, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Adapun rincian luas wilayah masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)
1.	Mijen	14	57,55
2.	Gunungpati	16	54,11
3.	Banyumanik	11	25,69
4.	Gajahmungkur	8	9,07
5.	Semarang Selatan	10	5,93
6.	Candisari	7	6,54
7.	Tembalang	12	44,20

8.	Pedurungan	12	20,72
9.	Genuk	13	27,39
10.	Gayamsari	7	6,18
11.	Semarang Timur	10	7,70
12.	Semarang Utara	9	10,97
13.	Semarang Tengah	15	6,14
14.	Semarang Barat	16	21,74
15.	Tugu	7	31,78
16.	Ngaliyan	10	37,99
	TOTAL	177	373,70



*Gambar 2. 1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021*

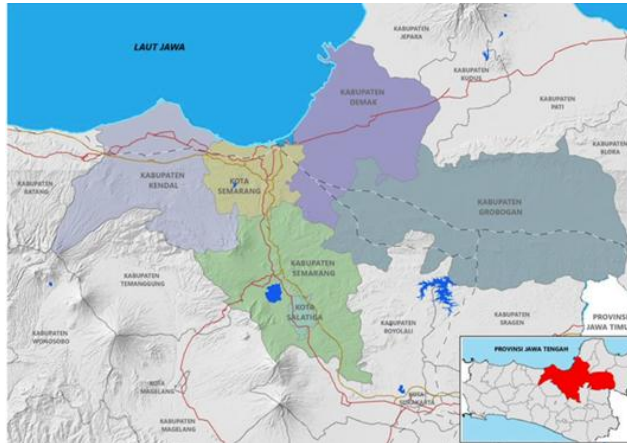
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Semarang berada pada koordinat 6°50'–7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Kota ini memiliki elevasi antara 0,75 hingga 348 meter di atas permukaan laut, sehingga menjadikan Semarang sebagai salah satu kota yang terletak pada kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Semarang secara topografis mempunyai unik karena etrdiri dari kota atas dan bawah. Untuk daerah dataran tinggi yang diisi dengan perbukitan, terdapat Jatingaleh, Gombel, Tugu, Mijen dan Gunungpati dengan tinggi dataran mencapai 90.56-348 mdpl.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menempati posisi strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi tersebut. Letak strategis ini menjadikan Semarang sebagai koridor pembangunan dengan empat simpul utama, yaitu koridor utara, selatan, timur, dan barat. Peran tersebut semakin diperkuat oleh keberadaan berbagai fasilitas transportasi, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol. Seluruh infrastruktur ini menjadikan Kota Semarang sebagai titik penting aktivitas pembangunan sekaligus pintu gerbang perekonomian di Jawa Tengah dan wilayah tengah Pulau Jawa.

Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Kedungsepur, posisi strategis Kota Semarang semakin diperkuat melalui keterkaitannya dengan wilayah sekitar. Kedungsepur merupakan akronim dari Kendal–Demak–Ungaran–Semarang–Salatiga–Purwodadi, yaitu kawasan pengembangan metropolitan di Jawa Tengah yang ditetapkan dalam kebijakan tata ruang nasional untuk mendorong integrasi pembangunan, pemerataan ekonomi, serta konektivitas antarwilayah. Adanya kawasan metropolitan ini menjadikan Kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan yang mengoordinasikan aliran mobilitas penduduk, aktivitas perdagangan, dan distribusi barang dan jasa. Berikut peta Kawasan Metropolitan Kedungsepur

yang menunjukkan hubungan spasial dan konektivitas Kota Semarang dengan wilayah sekitarnya.



*Gambar 2. 2 Peta Konstelasi Kedungsepur
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021*

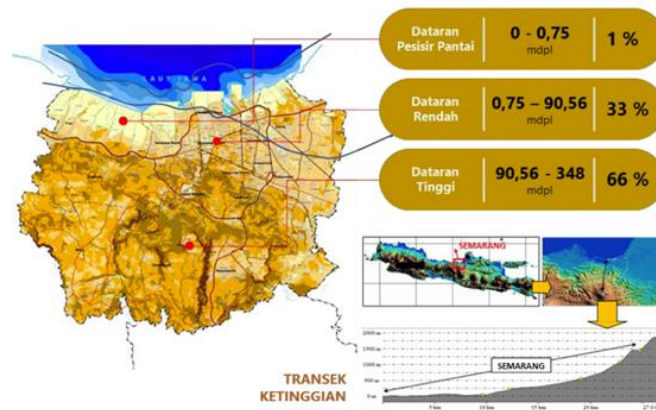
Dari perspektif kewilayahan, Kota Semarang merupakan bagian dari kawasan Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan) yang secara keseluruhan mencakup 85 kecamatan. Kota Semarang sendiri terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pada dinamika pembangunan Jawa Tengah, Kota Semarang memegang peranan penting, terutama karena keberadaan pelabuhan, jaringan transportasi darat, baik jalur kereta api maupun jalan raya, serta fasilitas transportasi udara yang menjadikannya sebagai simpul transportasi regional sekaligus kota transit utama di Jawa Tengah. Selain itu, posisinya juga strategis dalam hubungan antardaerah, termasuk konektivitas langsung dengan wilayah di luar Pulau Jawa, sehingga memperkuat perannya sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

2.1.3. Kondisi Topografi

Kota Semarang dikenal sebagai kota pesisir dengan topografi yang bervariasi, memiliki elevasi antara sekitar 0,75 hingga 348 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, wilayah ini memiliki karakter bentang alam yang khas, terdiri dari dataran pantai, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Bagian utara Kota Semarang didominasi oleh dataran rendah dan area pesisir yang meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk, dengan ketinggian berkisar antara 0,75 hingga 90,56 meter di atas permukaan laut. Kawasan pesisir utara ini dikenal sebagai Semarang Bawah. Berbagai pusat kegiatan penting, seperti pusat pemerintahan, perdagangan, Kota Lama, serta fasilitas strategis seperti stasiun dan bandara—berada di wilayah Semarang Bawah.

Wilayah selatan yang memiliki karakter perbukitan dikenal sebagai Semarang Atas. Secara geomorfologis, semakin ke arah selatan, morfologi Kota Semarang menunjukkan elevasi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah utara. Kawasan perbukitan dengan ketinggian antara 90,56 hingga 348 meter di atas permukaan laut mencakup area pinggiran serta bagian selatan kota, yaitu Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik, dan Tembalang. Perkembangan Kota Semarang juga semakin mengarah ke kawasan Semarang Atas, dan kecenderungan ini berpotensi mengancam daerah hulu sungai yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Peta topografi Kota Semarang berikut memperlihatkan perbedaan elevasi antara

wilayah utara dan selatan serta menggambarkan karakteristik kawasan perbukitan di bagian selatan kota.



Gambar 2. 3 Kondisi Topografi Kota Semarang
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2021

2.1.4. Kondisi Demografi

Struktur administrasi Kota Semarang menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam luas wilayah antar kecamatan, khususnya jika dibandingkan antara kawasan selatan dan pusat kota. Perbedaan luasan ini mencerminkan keragaman karakter fisik serta fungsi ruang di masing-masing wilayah.

Dua kecamatan dengan wilayah terluas berada di bagian selatan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati seluas 54,11 km². Kedua wilayah tersebut didominasi kawasan perbukitan yang masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah seluas 6,14 km². Kedua kecamatan ini merupakan pusat kota sekaligus pusat kegiatan ekonomi, sehingga dipenuhi bangunan-bangunan bersejarah seperti Kawasan

Simpang Lima, Tugu Muda, Pasar Bulu, Pasar Peterongan, serta Pasar Johar dan area sekitarnya yang dikenal sebagai “Kota Lama” Semarang.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai 1.708.833 jiwa. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kota ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tren kenaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 yang menampilkan pertumbuhan penduduk Kota Semarang sejak 2021 hingga 2024.

Tabel 2. 2 Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang

No	Tahun	Jumlah penduduk	Persentase Laju (%)
1.	2021	1.656.564	0,18
2.	2022	1.659.975	0,21
3.	2023	1.694.743	2,09
4.	2024	1.708.833	0,83

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,18%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun berikutnya dengan persentase 0,21%. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang lebih signifikan, yaitu mencapai 2,09%. Pada tahun 2024, walaupun angka persentase laju tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun angka jumlah penduduk semakin bertambah.

Kepadatan penduduk Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, yakni mencapai 4.571 jiwa per km². Namun demikian, distribusi penduduk antar kecamatan masih belum merata. Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai wilayah dengan

kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.261 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Tugu merupakan wilayah dengan kepadatan terendah, yakni 1.155 jiwa per km². Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di setiap kecamatan Kota Semarang pada tahun 2024:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk di Kota Semarang pada tiap kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Mijen	93.088
2	Gunungpati	101.577
3	Banyumanik	143.746
4	Gajah Mungkur	56.334
5	Semarang Selatan	62.018
6	Candisari	75.442
7	Tembalang	201.821
8	Pedurungan	197.468
9	Genuk	137.356
10	Gayamsari	70.388
11	Semarang Timur	66.475
12	Semarang Utara	117.865
13	Semarang Tengah	55.208
14	Semarang Barat	149.327
15	Tugu	34.092
16	Ngaliyan	146.628
Kota Semarang		1.708.833

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Semarang dalam Angka 2024.

2.2 Polrestabes Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi Polrestabes Kota Semarang

Visi :

Tercapainya pelayanan Kamtibmas yang optimal, penegakan hukum dan keamanan dalam negeri yang stabil, serta terbangunnya sinergi kepolisian yang proaktif.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Polrestabes Semarang agar mampu memberikan pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai dinamika dan tantangan yang dihadapi.
2. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, serta membangun kemitraan yang kuat.
3. Menjaga soliditas internal Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang dapat merugikan organisasi.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma budaya yang berlaku di lingkungan sekitar.
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjaga Kamtibmas.
6. Mewujudkan situasi keamanan yang kondusif melalui peran aktif masyarakat dan instansi terkait, termasuk dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah.
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang guna meminimalkan potensi penyimpangan.

8. Mengelola seluruh sumber daya Polri secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern guna mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian..

2.2.2 Tugas dan Fungsi Polrestabes Kota Semarang

Satlantas Polrestabes Semarang memegang peran strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Kota Semarang. Berikut adalah tugas dan fungsi utama Satlantas:

- a. Tugas Pokok Satlantas

1. Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli):

Kegiatan tersebut mencakup pengaturan arus lalu lintas serta penjagaan di titik-titik yang dinilai rawan, pengawalan beragam aktivitas masyarakat, serta melakukan patroli sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya.

2. Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Lalu Lintas:

Mencakup pemberian pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan serta etika berkendara, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan para pengguna jalan.

3. Rekayasa Lalu Lintas:

Tugas ini mencakup analisis serta penataan kembali sistem lalu lintas dengan tujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran serta efektivitas perjalanan.

4. Registrasi dan Identifikasi (Regident):

Meliputi penyelenggaraan layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kendaraan bermotor dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).

5. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas:

Terdiri atas tahapan penyelidikan dan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas dengan tujuan mengidentifikasi penyebab serta menentukan pihak yang berkewajiban bertanggung jawab.

6. Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas:

Merupakan bentuk penindakan atas pelanggaran lalu lintas melalui mekanisme tilang manual maupun ETLE, dengan tujuan mendorong efek jera dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara.

b. Fungsi Pendukung

1. Koordinasi Antar Lembaga:

Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah, dalam rangka penataan serta pengawasan terhadap pengelolaan lalu lintas.

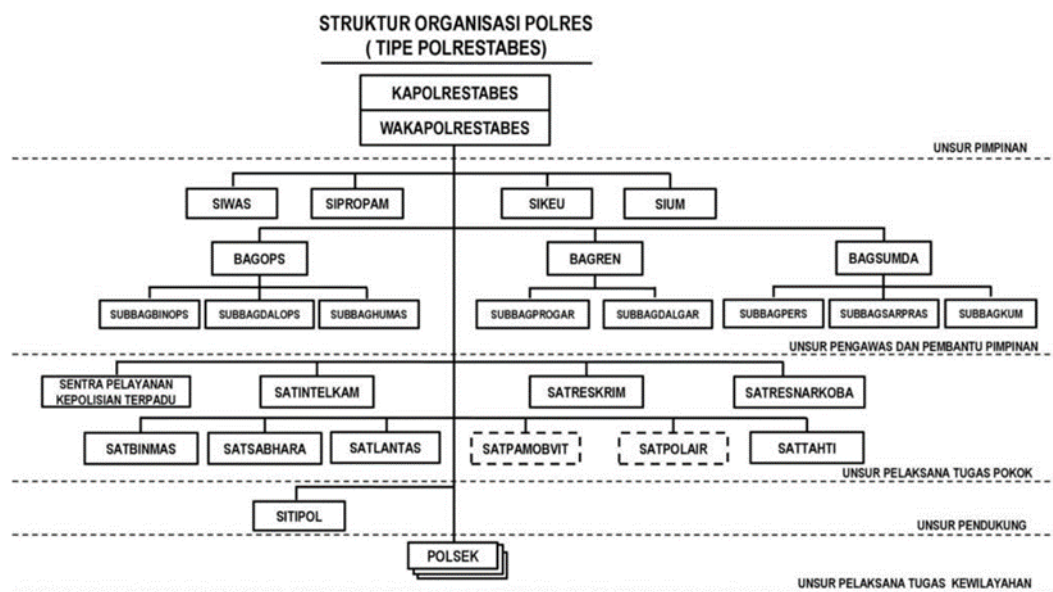
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana:

Melaksanakan perawatan dan pembaruan terhadap fasilitas lalu lintas, seperti rambu, marka jalan, dan perangkat ETLE, agar sistem lalu lintas dapat berfungsi secara optimal.

3. Pelayanan Publik:

Memberikan informasi, bantuan, dan dukungan kepada masyarakat terkait berbagai persoalan dan kebutuhan yang berkaitan dengan lalu lintas.

2.2.3 Struktur Organisasi Polrestabes Kota Semarang



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Polrestabes Kota Semarang

2.3 Program E-Tilang

Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas melalui pemanfaatan teknologi elektronik. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2016 di berbagai kota besar, cakupan program ini terus diperluas sesuai kebutuhan penegakan hukum yang lebih modern dan transparan (Korlantas Polri, 2020). Sistem E-Tilang dirancang untuk mempercepat penindakan pelanggaran, mengurangi kontak langsung antara petugas

dan pelanggar, serta menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum (Korlantas Polri, 2021).

Secara nasional, E-Tilang diintegrasikan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang memanfaatkan kamera pemantau pada lokasi-lokasi strategis. Kamera tersebut secara otomatis merekam setiap pelanggaran yang terjadi, kemudian data dikirim ke pusat pengolahan untuk diverifikasi petugas. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, pemilik kendaraan menerima surat pemberitahuan dan dapat melakukan klarifikasi maupun pembayaran denda secara daring, sehingga proses administrasi menjadi lebih mudah dan efisien (Sari & Utami, 2022).

Di Kota Semarang, penerapan E-Tilang telah dilakukan pada berbagai titik dengan kepadatan lalu lintas tinggi dan tingkat pelanggaran yang relatif besar. Kota ini termasuk salah satu daerah yang aktif mengembangkan penegakan hukum berbasis teknologi dengan pemasangan kamera ETLE pada simpang-simpang utama, kawasan pusat kota, serta beberapa lokasi rawan kecelakaan. Penerapan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota dan Kepolisian dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas sekaligus memperkuat pengawasan terhadap mobilitas perkotaan yang dinamis (Putra & Ramadhan, 2021).

Pelaksanaan E-Tilang di Kota Semarang juga didukung oleh kerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam penataan lalu lintas serta penyediaan sarana pendukung seperti rambu dan marka. Selain itu, perangkat ETLE rutin dipelihara untuk memastikan kualitas rekaman pelanggaran tetap optimal. Langkah tersebut

mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan kepolisian untuk mewujudkan kondisi lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan nyaman bagi para pengguna jalan.

Secara keseluruhan, penerapan E-Tilang di Kota Semarang merupakan salah satu wujud nyata modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Melalui penerapan teknologi, proses pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan transparan, sementara masyarakat memperoleh kemudahan dalam penyelesaian pelanggaran secara cepat dan akuntabel.